

# Pendidikan Islam Popular: Sebuah Renungan Atas Nasib Pendidikan Madrasah di Tengah Pendidikan Nasional

**M. Misbah**

Dosen Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto

**Abstract:** In the course of the history of Islamic education, Islamic schools as institutions of Islamic education was not as expected. One side, in terms of religion, alumni are not able to compete with graduates of boarding schools and on the other hand, in terms of general science, can not compete with public schools. So too, madrasahs in education and learning are not in line with community interests, and can not solve the problems faced by society. There has been a "dehumanization" in the practice of education in madrasahs. Therefore, to liberate the madrasah education from the process of "dehumanization", as well as for education in accordance with the interests of society, the madrasah education should be society-based (popular) to instill a spirit critical of social phenomena. Therefore, the critical educational needs in the learning process, cooperation between the madrasahs with the community and always do the renewal of the religious doctrines which have been shallowed.

**Keywords:** *Madrasah, Islamic Popular Education, Critical Education.*

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap orang sebagai karena pendidikan tidak dapat dipisahkan dari diri setiap manusia. Dengan pendidikan, manusia akan dapat mempertahankan eksistensinya yang secara kodrati berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Hal ini telah diakui oleh bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, pada ayat (3) dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa bertanggung jawab

mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Hal tersebut adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Amanat tersebut mempunyai arti bahwa sejak awal berdirinya negara Indonesia, kebodohan dan rendahnya tingkat ilmu pengetahuan masyarakat merupakan persoalan riil yang perlu ditangani melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan, pembaharuan dan peningkatan serta intensifikasi sistem pendidikan secara terus-menerus agar tujuan pokok ini dapat tercapai.

Pendidikan juga merupakan proses yang penting bagi kehidupan manusia, karena memuat dimensi praksis berupa tindakan atau praktik. Istilah praktik di sini berarti penuangan teori ke dalam praktik, sehingga praktik pendidikan jelas garis, dasar serta arahnya,<sup>1</sup> dengan kata lain pendidikan merupakan usaha yang bersifat sadar tujuan.<sup>2</sup> Dengan adanya pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena di dalamnya terdapat proses yang dapat memberikan berbagai ilmu pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang selanjutnya mampu mengarahkan manusia ke arah perubahan yang lebih baik.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai fenomena kekerasan dan kejahatan yang berlangsung dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Tawuran antarpelajar, antarmahasiswa, bahkan antaranggota dewan di Gedung DPR, kriminalitas, premanisme, korupsi, dan berbagai bentuk kekerasan lain terjadi setiap saat dengan intensitas yang semakin lama semakin tinggi dan serius. Nilai-nilai etik religius seakan-akan hanyalah doktrin-doktrin melangit yang tidak memiliki implikasi dalam pembentukan sikap dan perilaku sehari-hari.

Fenomena ini bertambah akut ketika ditunggangi oleh kepentingan politik dan agama. Orientasi pragmatis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik semakin mengentalkan sikap destruktif ini. Sikap keberagamaan yang eksklusif dan sektarian juga turut serta melegalkan penindasan dan kekerasan terhadap kelompok lain dengan mengatasnamakan kebenaran itu sendiri. Bahkan, dengan *truth claim*-nya, kebenaran seakan-akan hanyalah milik

mereka, sementara yang lain bukanlah kebenaran, bahkan bukan merupakan realitas. Fanatisme ini semakin mengeras ketika kepentingan politik ikut memberikan justifikasi atas sikap sektarian ini.<sup>3</sup>

Realitas tersebut kemudian berimbas kepada citra negatif umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia. Sebutan agresif, destruktif, ekstrimis, eksklusif, mengingkari hukum, teroris, biadab, fanatik, fundamentalis, dan dunianya dipenuhi dengan pertentangan, perpecahan dan peperangan serta diklaim sebagai dunia yang sakit.<sup>4</sup>

Pertanyaan kemudian adalah, mengapa kehidupan umat Islam sejak dulu hingga sekarang senantiasa mengalami kemunduran? Berbagai jawaban terhadap pertanyaan tersebut diajukan oleh para pakar. Di antara mereka mengatakan bahwa kemunduran umat Islam itu karena kegiatan intelektual umat Islam telah mati (kreativitas intelektual umat Islam lemah).<sup>5</sup> Selain itu, hal lain yang menyebabkan posisi umat Islam mengalami kemunduran dikarenakan adanya dikotomi ilmu pengetahuan, ilmu tradisional (Islam) pada satu sisi dan ilmu sekuler modern (umum) pada sisi lain. Dalam hal ini, telah terjadi dualisme dalam sistem pendidikan umat Islam, yaitu sistem pendidikan tradisional (Islam) serta sistem pendidikan sekuler modern (umum).<sup>6</sup> Masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan antara yang satu dengan yang lain hampir tidak terlihat ada keterkaitan sama sekali. Hal inilah yang kemudian memunculkan *output* dan *outcomes* pendidikan yang ada yang memiliki satu kepribadian yang terbelah (*split personality*).<sup>7</sup> Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kesalehan dalam individu (shalat berjamaah tiap waktu, berpuasa wajib dan sunnah, pendidikan tinggi, dan lain-lain) namun dalam realitas sosial, mereka bertindak sebaliknya.

Berbagai problem tersebut membangkitkan keprihatinan umat Islam pada umumnya, dan khususnya bagi para pemerhati dunia pendidikan Islam seperti; Syed Muhammad Naquib al-Attas, Ismail Raji al-Faruqi, Fazlur Rahman, Syed HOSSEIN Nasr, dan lain-lain. Mereka berusaha menghilangkan dikotomi keilmuan tersebut dan mencoba menyatukannya dengan jalan pengislaman ilmu-ilmu pengetahuan (islamisasi sains).<sup>8</sup> Oleh karena itu, muncullah lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya tidak saja mengajarkan ilmu-ilmu agama

(Islam/tradisional) saja tetapi diajarkan juga ilmu-ilmu umum modern sekuler yang terkenal dengan nama madrasah.

Namun demikian, dalam perjalanannya, ternyata alumni dari madrasah sebagian besar belum dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan semula. Jika dibandingkan dengan pendidikan tradisional (pesantren), maka alumni madrasah belum dapat bersaing dalam bidang agama, sementara dalam bidang umum, mereka belum dapat bersaing dengan sekolah umum. Oleh karena itu, perlu dicari solusi atas berbagai problem yang ada, agar lembaga pendidikan Islam (madrasah) dapat bersaing dengan sekolah pada umumnya tetapi tetap mempunyai karakternya sendiri. Di antara solusi tersebut, dengan menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan yang terjadi di masyarakat serta mampu menjawab dan memecahkan problematika yang dihadapi masyarakat (pendidikan berbasis masyarakat).

Agar para siswa dan *stakeholder* madrasah peka terhadap problematika yang dihadapi masyarakat serta perkembangannya, maka di antara solusinya adalah perlu ditanamkan kesadaran kritis dengan melalui pendidikan kritis guna membebaskan mereka dari adanya kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Begitu juga untuk membangkitkan kembali intelektualisme umat Islam melalui pendidikan.

## Hakikat Tujuan Pendidikan dalam Islam

Dalam Islam, ada suatu filosofi dasar yang diterima umum bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia diciptakan memiliki tujuan mulia, beribadah kepada Allah dan untuk menjadi *khalifah* di muka bumi. Ini adalah tujuan diciptakannya manusia oleh Allah di muka bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya mengikuti tujuan rancangan diciptakannya manusia di muka bumi itu oleh Allah. Dengan demikian, tujuan pendidikan sudah seharusnya selaras dengan tujuan awal manusia diciptakan.

Menurut Ahmad D. Marimba sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan, "Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang sempurna."<sup>9</sup> Tujuan kegiatan pendidikan adalah

terbentuknya kepribadian yang utama. Adapun Athiyah al-Abrasy mengatakan bahwa tujuan yang harus dicapai melalui kegiatan pendidikan adalah terbentuknya manusia yang sempurna akhlaknya. Hasan Langgulung mengatakan bahwa pendidikan bertujuan memelihara kehidupan manusia. Selanjutnya, Ali Ashraf mengatakan bahwa pendidikan bertujuan menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelek, rasional diri, perasaan, dan kepekaan tubuh, oleh karena itu pendidikan harus menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspek spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik, baik secara individual maupun secara kolektif dan memotivasi semua aspek untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan.<sup>10</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan dalam Islam adalah mewujudkan manusia yang cerdas, kritis, aktif, kreatif, serta saleh, baik secara individu maupun sosial. Sebagai individu, ia menjadi manusia yang cerdas, kreatif dan menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, sedangkan sebagai makhluk sosial, ia mampu bergaul dengan masyarakat secara baik, mampu membangun serta memperkaya pengalaman masyarakat. Tujuan ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam menurut Rahman sebagaimana dikutip oleh Sutrisno, yaitu terciptanya ilmuwan-ilmuwan muslim yang kritis, analisis, dan kreatif yang dapat menghasilkan temuan-temuan yang mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh umat manusia.<sup>11</sup> Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam juga selaras dengan tujuan diciptakannya manusia, yaitu hamba yang taat kepada Allah dan menjadi *khalifah*-Nya di muka bumi.

Agar tujuan pendidikan Islam tersebut dapat tercapai, maka di madrasah perlu ditanamkan sikap kritis terhadap semua *stakeholder* yang ada, dengan tujuan praktik pendidikan yang berlangsung akan berjalan seiring dengan harapan masyarakat dan praktik pendidikan yang dijalankan adalah praktik pendidikan yang humanis.

## Pendidikan Kritis (Sebuah Solusi)

Kata 'kritis' berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*critic, critical, criticism, criticize, critique*" yang berarti kritis, kupas, tinjauan, membahas, mengupas secara kritis.<sup>12</sup>

Pendidikan kritis merupakan pendidikan yang menekankan seluruh *stakeholder* madrasah mampu mengupas secara kritis berbagai hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran di madrasah. Pendidikan kritis ini merupakan salah satu paham dalam pendidikan yang mengutamakan pemberdayaan dan pembebasan. Term lain yang masih mempunyai ruh yang sama dengan pendidikan kritis ini adalah pendidikan humanis,<sup>13</sup> pendidikan transformatif,<sup>14</sup> pendidikan pembebasan, pendidikan Islam integratif,<sup>15</sup> ataupun pendidikan Islam yang menghidupkan.<sup>16</sup>

Setiap proses pendidikan dan pelatihan senantiasa dihadapkan pada pilihan antara menyesuaikan diri dan mereproduksi sistem pendidikan yang ada (penganut paham reproduksi), atau memerankan peran kritis terhadap sistem yang ada (penganut paham produksi).<sup>17</sup> Jika proses belajar lebih dimaksudkan untuk mempersiapkan 'sumber daya manusia' untuk mereproduksi sistem yang tidak adil, tanpa menggugatinya, maka proses belajar yang diselenggarakan tersebut adalah bagian dari masalah. Karena dengan posisi seperti itu pada dasarnya proses belajar tersebut ikut melanggengkan ketidakadilan masyarakat (mempertahankan *status quo*). Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan telah gagal memerankan visi utama pendidikan sebagai "pemanusiaan manusia" untuk menjadi subjek transformasi sosial. Transformasi yang dimaksud adalah proses penciptaan hubungan yang secara fundamental baru dan lebih baik.<sup>18</sup>

Dalam perspektif kritis, tugas pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap sistem dan "ideologi dominan" yang tengah berlaku di masyarakat, serta menantang sistem tersebut untuk memikirkan sistem alternatif ke arah transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adil. Tugas ini dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan menciptakan ruang agar muncul sikap yang kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan sosial, serta melakukan dekonstruksi terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil.<sup>19</sup>

Bagi penganut pendidikan kritis, ketidakadilan kelas, diskriminasi gender serta berbagai bentuk ketidakadilan sosial lainnya seperti hegemoni kultural dan politik serta dominasi melalui diskursus pengetahuan yang merasuk di masyarakat akan terefleksi dalam proses pendidikan. Refleksi ini harus menjadi acuan kondisi sosial dalam dunia pendidikan.<sup>20</sup>

Agar lembaga pendidikan Islam (madrasah) tidak menjadi lembaga pendidikan yang ikut serta mempertahankan *status quo* dengan menyesuaikan diri dan mereproduksi sistem pendidikan yang ada (penganut paham reproduksi) serta dengan menerapkan konsep "bank" dalam pendidikan (*banking concept of education*),<sup>21</sup> tidak menjadi bagian dari masalah. Akan tetapi, pendidikan dapat memerankan peran kritis terhadap sistem yang ada (penganut paham produksi) dan menjadi pemecah masalah, maka pendidikan yang ada haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri (manusia adalah penguasa atas dirinya dan karenanya fitrah manusia itu adalah menjadi merdeka, menjadi bebas). Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang tetap, yakni:

1. unsur guru;
2. unsur pelajar atau anak didik; serta
3. unsur realitas dunia.

Unsur guru dan pelajar atau anak didik adalah subjek yang sadar (*cognitive*), sementara realitas dunia (masyarakat) adalah objek yang tersadari atau disadari (*cognizable*).<sup>22</sup> Hubungan dialektis inilah yang kurang atau tidak terdapat dalam sistem pendidikan mapan selama ini. Dengan demikian, pendidikan yang berlangsung di madrasah akan berjalan dialektis, dialogis, tidak menggunakan sistem mekanik atau sistem ahli dapat selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta berbasis pada problem sosial yang dihadapi.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di madrasah harus mencerdaskan sekaligus bersifat membebaskan pesertanya untuk menjadi pelaku (subjek) utama dan bukan sasaran perlakuan (objek) dari proses tersebut. Adapun ciri-ciri pokoknya adalah:

1. *Belajar dari realitas atau pengalaman*. Materi yang dipelajari bukan "ajaran" (teori, pendapat, kesimpulan, wejangan, nasihat, dan seterusnya) dari seseorang, tetapi keadaan nyata masyarakat atau pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Hal itu misalnya hegemoni kekuasaan dari kaum penindas terhadap pihak tertindas, bias gender, adanya ketidakadilan dalam praktik keagamaan, fenomena kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak ada otoritas pengetahuan seseorang yang lebih tinggi dari yang lainnya,<sup>23</sup>

2. *Tidak menggurui*. Dalam kaitan ini, tidak ada "guru" dan tidak ada "murid" yang digurui. Guru hanyalah berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran yang berlangsung. Semua orang terlibat dalam proses pendidikan ini;

3. *Dialogis*. Proses yang berlangsung bukanlah proses pembelajaran yang sepihak dari guru ke murid yang bersifat satu arah tetapi proses "komunikasi" dalam berbagai bentuk kegiatan (diskusi kelompok, bermain peran, dan sebagainya).<sup>24</sup> Dalam ungkapan lain, pembelajaran yang berlangsung menggunakan *active learning* (pembelajaran aktif).

### **Realisasi Pendidikan Kritis dalam Pendidikan di Madrasah**

Pendidikan tidak hanya terkait dengan problem individu, tetapi juga terkait dengan problem umat atau masyarakat sebagai bagian dari realitas dunia. Karena itu, pendidikan seharusnya juga dirancang untuk dapat menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Bukan sebaliknya, pendidikan menjadi masalah dari suatu masyarakat. Pendidikan juga dapat menciptakan masyarakat yang berbeda dari masyarakat yang telah ada. Oleh karenanya, dinamika kehidupan suatu masyarakat dapat dilihat dari dinamika pendidikannya. Jika dinamika pendidikan berjalan dengan baik, maka dinamika kehidupan masyarakat juga akan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya.<sup>25</sup>

Sebagai bentuk realisasi dari adanya pendidikan kritis yang ada di madrasah, maka perlu dilakukan suatu upaya kerjasama dengan masyarakat dengan berbagai bentuknya, di antaranya adalah sebagai berikut.

#### **1. Mewujudkan Jalinan Kerjasama Madrasah dengan Masyarakat**

Upaya mengidentifikasi potensi masyarakat (di luar madrasah) kadang tidak seimbang dengan upaya mengidentifikasikan potensi yang dapat dijual ke masyarakat. Banyak potensi berupa kegiatan, gagasan, keahlian atau produk madrasah yang kurang dikenal masyarakat di sekitar lingkungan madrasah dan juga oleh dunia usaha. Hal itu antara lain adalah fasilitas madrasah yang dapat digunakan bersama masyarakat, hasil praktik siswa, keahlian para guru,

jasa yang dapat dijual para siswa, serta gagasan/pemikiran para guru untuk memajukan masyarakat.

Sebagaimana diungkap oleh Dedi Permadi<sup>26</sup> bahwa:

Masyarakat akan tertarik untuk datang ke madrasah bila menyangkut anak-anak mereka atau ada sesuatu yang menarik mereka. Untuk itu, dalam upaya menjadikan madrasah sebagai pusat kegiatan masyarakat perlu dirancang kegiatan-kegiatan seperti: (1) pameran hasil karya murid, (2) lomba keterampilan seperti membuat alat peraga, memasak dan sebagainya, (3) lomba kebersihan kelas dan lomba kebersihan rumah orang tua siswa dan (4) lomba kesenian dan olahraga.

Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama madrasah dengan masyarakat perlu diupayakan hal-hal berikut:

- a. Menganalisa kebutuhan masyarakat;
- b. Mengadakan komunikasi intensif;
- c. Melibatkan masyarakat; dan
- d. Memecahkan masalah bersama dengan masyarakat (Dewan Madrasah).

## **2. Memaksimalkan Peran Komite Madrasah**

Sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan sekolah/madrasah dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang semakin meningkat dewasa ini, maka dalam era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)<sup>27</sup> pengelolaan pendidikan perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan "masyarakat sekolah" yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah/madrasah. Hal ini dikarenakan pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Agar partisipasi tersebut dapat lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan, maka perlu dikelola dan dikoordinasikan dalam suatu wadah yang kemudian disebut dengan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan. Hal ini dimaksudkan

agar pelaksanaan MBS di satuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.<sup>28</sup>

Dalam pelaksanaannya, tidak jarang Komite Madrasah yang semestinya menjadi pengontrol dan mitra jalannya pendidikan di madrasah, hanya menjadi "penyetempel" pemberi legalisasi terhadap proyek yang akan dilakukan madrasah. Oleh karena itu, perlu adanya maksimalisasi dari peran Komite Madrasah yang sesungguhnya, antara lain adalah:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.<sup>29</sup>

Dengan adanya jalinan kerjasama antara madrasah dengan masyarakat serta maksimalisasi peran Komite Madrasah, maka diharapkan praktik pendidikan yang ada di madrasah adalah praktik pendidikan yang berbasis masyarakat, yang kritis terhadap problematika masyarakat serta yang dapat memecahkan problem-problem tersebut. Dengan demikian, keberadaan madrasah akan diakui oleh masyarakat, begitu juga masyarakat akan dapat merasakan manfaat keberadaan madrasah.

### 3. Pembumian Doktrin-doktrin Agama yang Selama ini Mengalami Pendangkalan

Yahya Umar, sebagaimana dikutip oleh Tobroni,<sup>30</sup> mengatakan bahwa madrasah ibarat mesin sehingga perlu dijaga kondisinya agar senantiasa sehat. Mesin dalam sebuah organisasi pendidikan dapat berwujud budaya organisasi dan proses organisasi. Madrasah yang sehat adalah yang memiliki budaya organisasi yang positif dan proses organisasi yang efektif. Dalam mewujudkan budaya madrasah yang baru, diperlukan konsolidasi idiil berupa reaktualisasi (pembumian) doktrin-doktrin agama yang selama ini mengalami pendangkalan,

pembelokan dan penyempitan makna. Konsep tentang ikhlas, jihad, dan amal saleh perlu direaktualisasikan maknanya dan dijadikan *core values* dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Dengan landasan nilai-nilai fundamental yang kokoh, maka akan menjadikan madrasah memiliki modal social (*social capital*) yang sangat berharga dalam rangka membangun rasa saling percaya (*trust*), kasih sayang, keadilan, komitmen, dedikasi, kesungguhan, kerja keras, persaudaraan dan persatuan. Dengan *social capital* yang baik, akan memunculkan semangat berprestasi yang tinggi, terhindar dari konflik yang seringkali menjadi "hama" bagi perkembangan madrasah.

## Penutup

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena di dalamnya terdapat proses yang dapat memberikan berbagai ilmu pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang selanjutnya mampu mengarahkan manusia ke arah perubahan yang lebih baik. Begitu pula dengan tujuan pendidikan Islam yaitu mewujudkan manusia yang cerdas, kritis, aktif, kreatif, dan saleh, baik secara individu maupun sosial.

Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang merupakan solusi atas adanya dualisme pendidikan Islam ternyata tidak sesuai harapan. Satu sisi, dalam hal agama, alumninya tidak mampu bersaing dengan lulusan pesantren dan di sisi lain, dalam hal ilmu pengetahuan umum, tidak dapat bersaing dengan sekolah umum. Begitu puladalam pendidikan dan pembelajarannya yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, dan tidak dapat memecahkan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Terjadi dehumanisasi dalam praktik pendidikan di dalam madrasah.

Oleh karena itu, untuk membebaskan pendidikan madrasah dari proses dehumanisasi, serta agar pendidikan sesuai dan sejalan dengan kepentingan masyarakat, maka pendidikan madrasah harus berbasis masyarakat (*popular*) dengan menanamkan semangat kritis terhadap fenomena-fenomena sosial. Dengan demikian, diperlukan pendidikan kritis dalam proses pembelajaran, kerjasama antara madrasah dengan masyarakat serta senantiasa melakukan

realisasi (pembumian) doktrin-doktrin agama yang selama ini mengalami pendangkalan.

## Endnotes

<sup>1</sup> Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip Dan Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga, Sekolah dan di Masyarakat* (Bandung: CV. Diponegoro, 1989), hal. 3.

<sup>2</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran* (Bandung: Tarsito, 1984), hal. 14.

<sup>3</sup> Elya Munfarida, "Pendidikan Nilai: Membangun Moralitas Bangsa (Kajian Metode Internalisasi Nilai-nilai Etik Religius)", dalam *Jurnal Insania*, Vol. 10. No. 2, Mei - Agustus 2005 (Purwokerto: P3M, STAIN Purwokerto, 2005), hal. 217.

<sup>4</sup> Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2008), hal. 1. Kutipan dari Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, Terj. Muchtar Yahya dan M. Sami Latief (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 33.

<sup>5</sup> Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu tertutupnya pintu ijtihad, serangan al-Ghazali terhadap filsafat, dan meninggalnya Ibn Rusyd, seorang yang dianggap sebagai simbol rasionalisme Islam. Alasan merosotnya kreativitas intelektual umat Islam sebagai salah satu sebab kemunduran umat Islam juga disepakati oleh Fazlur Rahman. Lihat Sutrisno, *Pendidikan Islam yang...*, hal. 57-58.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>7</sup> Yaitu manusia yang memiliki kepribadian ganda, mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan agama tetapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan sosial kesehariannya. Mereka salah dalam hal agama di satu sisi, tetapi kesalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap sikap pekerjaannya sehingga mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesalahan yang dimilikinya. Lihat *Risalah NU*, No. 15/Thn III / 1431 H, hal. 68-71.

<sup>8</sup> Menurut ajaran Islam, ilmu tidak bebas nilai-sebagaimana yang dikembangkan ilmuan Barat-akan tetapi sarat nilai. Dalam Islam ilmu dipandang universal dan tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu dalam Islam. Oleh karena itu, sejarah dalam dunia ilmu Islam dahulu telah melahirkan ulama yang terkemuka yang dapat menguasai ilmu-ilmu "dunia" dan "akhirat". Mereka berusaha menyeimbangkan ide-ide besar dalam *tamadun* yang lain dengan ajaran agama Islam. Ini dapat dilihat sebagai contoh seperti al-Kindi, Ibnu Sina, al-Ghazali, dan lain-lain. Mereka berusaha menengahkan beberapa ide dasar dan mempertemukan ilmu "dunia" dengan ajaran Islam. Perbedaannya, mereka tidak menggunakan istilah "pengislaman ilmu" saat itu karena pada saat itu umat Islam begitu cemerlang dalam ilmu pengetahuan. Konsep islamisasi ilmu pengetahuan menjadi masyhur setelah Ismail Raji al-Faruqi memperjuangkannya sebagai salah satu cara agar umat Islam tidak terbelakang dari umat yang lain dalam hal sains. Lihat Mukhlisuddin Ilyas, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan" dalam [http://www.acehinstitute.org/opini\\_mukhlisuddin\\_ilyas\\_islamisasi\\_ilmu\\_pengetahuan.htm](http://www.acehinstitute.org/opini_mukhlisuddin_ilyas_islamisasi_ilmu_pengetahuan.htm). download, 27 mei 2010. Lihat "Manusia dan Agama" dalam <http://>

aktualisasi (pembumian) doktrin-doktrin agama yang selama ini mengalami pendangkalan.

## Endnotes

<sup>1</sup> Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip Dan Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga, Sekolah dan di Masyarakat* (Bandung: CV. Diponegoro, 1989), hal. 3.

<sup>2</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran* (Bandung: Tarsito, 1984), hal. 14.

<sup>3</sup> Etya Munfarida, "Pendidikan Nilai: Membangun Moralitas Bangsa (Kajian Metode Internalisasi Nilai-nilai Etik Religius)", dalam *Jurnal Insania*, Vol. 10. No. 2, Mei - Agustus 2005 (Purwokerto: P3M, STAIN Purwokerto, 2005), hal. 217.

<sup>4</sup> Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2008), hal. 1. Kutipan dari Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, Terj. Muchtar Yahya dan M. Samud Latief (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 33.

<sup>5</sup> Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu tertutupnya pintu ijtihad, serangan al-Ghazali terhadap filsafat, dan meninggalnya Ibn Rusyd, seorang yang dianggap sebagai simbol rasionalisme Islam. Alasan merosotnya kreativitas intelektual umat Islam sebagai salah satu sebab kemunduran umat Islam juga disepakati oleh Fazlur Rahman. Lihat Sutrisno, *Pendidikan Islam yang...*, hal. 57-58.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>7</sup> Yaitu manusia yang memiliki kepribadian ganda, mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan agama tetapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan sosial kesehariannya. Mereka salah dalam hal agama di satu sisi, tetapi kesalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap sikap pekerjaannya sehingga mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesalahan yang dimilikinya. Lihat *Risalah NU*, No. 15/Thn III / 1431 H, hal. 68-71.

<sup>8</sup> Menurut ajaran Islam, ilmu tidak bebas nilai-sebagaimana yang dikembangkan ilmuwan Barat-akan tetapi sarat nilai. Dalam Islam ilmu dipandang universal dan tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu dalam Islam. Oleh karena itu, sejarah dalam dunia ilmu Islam dahulu telah melahirkan ulama yang terkemuka yang dapat menguasai ilmu-ilmu "dunia" dan "akhirat". Mereka berusaha menyeimbangkan ide-ide besar dalam *tamadun* yang lain dengan ajaran agama Islam. Ini dapat dilihat sebagai contoh seperti al-Kindi, Ibnu Sina, al-Ghazali, dan lain-lain. Mereka berusaha menengahkan beberapa ide dasar dan mempertemukan ilmu "dunia" dengan ajaran Islam. Perbedaannya, mereka tidak menggunakan istilah "pengislaman ilmu" saat itu karena pada saat itu umat Islam begitu cemerlang dalam ilmu pengetahuan. Konsep islamisasi ilmu pengetahuan menjadi masyhur setelah Ismail Raji al-Faruqi memperjuangkannya sebagai salah satu cara agar umat Islam tidak terbelakang dari umat yang lain dalam hal sains. Lihat Mukhlisuddin Ilyas, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan" dalam [http://www.acehinstitute.org/opini\\_mukhlisuddin\\_ilyas\\_islamisasi\\_ilmu\\_pengetahuan.htm](http://www.acehinstitute.org/opini_mukhlisuddin_ilyas_islamisasi_ilmu_pengetahuan.htm). download, 27 mei 2010. Lihat "Manusia dan Agama" dalam <http://>

<sup>24</sup> Lihat Roem Topasimasang, Toto Rahardjo, Mansour Faqih, *Pendidikan Popular....*, hal. 58.

<sup>25</sup> Sutrisno, *Pendidikan yang...*, hal. 62-63.

<sup>26</sup> <http://izaskia.wordpress.com/2010/04/20/menggagas-model-kerjasama-madrasah-dengan-masyarakat/#more-974> download, 26 mei 2010.

<sup>27</sup> Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) / *School Based Management (SBM)* merupakan salah satu pemikiran tentang pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Selain itu MBS didefinisikan juga sebagai desentralisasi otoritas pengambilan keputusan pada tingkat sekolah yang pada umumnya menyangkut tiga bidang, yaitu anggaran, kurikulum dan personel. lihat dalam E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 11; dan Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 7.

<sup>28</sup> Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTsN 02 Semarang dalam <http://re-searchengines.com/1005sukron.html>.

<sup>29</sup> Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam [http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah\\_bab4.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab4.html), hal. 13.

<sup>30</sup> Tobroni, "Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah", dalam <http://re-searchengines.com/drtobroni5-07.html>

## Daftar Pustaka

An-Nahlawi, Abdurrahman. 1989. *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*. Bandung: CV. Diponegoro.

Echols, John M., dan Hasan Shadily. 1987. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Freire, Paulo, Ivan Illich, Erich Fromm dkk. 2001. *Menggugat Pendidikan (Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis)*, Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<http://izaskia.wordpress.com/2010/04/20/menggagas-model-kerjasama-madrasah-dengan-masyarakat/#more-974> download, 26 mei 2010

[http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah\\_bab4.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab4.html)

<http://re-searchengines.com/1005sukron.html>.

Ilyas, Mukhlisuddin. "Islamisasi Ilmu Pengetahuan" dalam [http://www.acehinstitute.org/opini\\_mukhlisuddin\\_ilyas\\_islamisasi\\_ilmu\\_pengetahuan.htm](http://www.acehinstitute.org/opini_mukhlisuddin_ilyas_islamisasi_ilmu_pengetahuan.htm). download, 27 mei 2010.

- Moosa, Ebrahim. 2004. *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan di dalam hukum Islam*, Terj. Yasrul Huda dan Syafiq Hasyim. Jakarta: ICIP.
- Muliawan, Jasa Ungguh. 2005. *Pendidikan Islam Integratif (Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munfarida, Elya. 2005. "Pendidikan Nilai: Membangun Moralitas Bangsa (Kajian Metode Internalisasi Nilai-nilai Etik Religius)", dalam *Insania*, Vol. 10. No. 2, Mei - Agustus 2005. Purwokerto: P3M, STAIN Purwokerto.
- Nata, Abudiddin. 1997. *Filsafat Pendidikan Islam 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nurkholis. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Piliang, Yasraf Amir. 2005. "Absurditas Intelektual", *Kompas*, 26 Mei 2005.
- Rembangy, Musthofa. 2008. *Pendidikan Transformatif (Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi)*. Yogyakarta: TERAS. *Risalah NU*, No. 15/Thn III / 1431 H. hal. 68-71
- Sumaatmadja, H. Nursid. 2002. *Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi*. Bandung: ALFABETA.
- Surachmad, Winarno. 1984. *Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*. Bandung: Tarsito.
- Sutrisno. 2008. *Pendidikan Islam yang Menghidupkan*. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Syalabi, Ahmad. 1973. *Sejarah Pendidikan Islam* terj. Muchtar Yahya dan M. Sanusi Latief. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tobroni. TT. "Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah" dalam <http://researchengines.com/drtobroni5-07.html>
- Topasimasang, Roem, Toto Rahardjo, Mansour Faqih. 2005. *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Wordpress. 2009. Manusia dan Agama dalam <http://pakoz.wordpress.com/2009/01/27/ismail-raji-al-faruqi/> . download, 27 mei 2010.
- Zuhairini, dkk. 1995. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.